



Implementasi Materi Pembelajaran PPKn terhadap Tindakan Demokrasi di MTsN 2 Pematang Siantar

Implementation of Civic Education Learning Materials on Democratic Actions at MTsN 2 Pematang Siantar

Nur Zikra Putri¹, Meliana Silalahi², Ririn Yoseva Silalahi³, Vivin Kristabel Telaumbanua⁴, Doni Irawan Saragih⁵

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan

Email: Nurzikra1122@gmail.com¹, meliana.1243113043@mhs.unimed.ac.id², ririnsilalahi2020@gmail.com³

vivintel1118@gmail.com⁴, doniirawansaragih@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 03-06-2025

Revised : 05-06-2025

Accepted : 07-06-2025

Published : 09-06-2025

Abstract

In the context of a modern state, democracy is the foundation that underlies the legal order, social system, public policy, and political culture. Therefore, it is important for every citizen to understand the essence of democracy and the role they can play in it. This research applies a qualitative approach with a descriptive method, data is obtained through an interview method so that the instrument used is only an interview guideline. The data obtained will then be analyzed through several stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show several democratic actions in the MTsN 2 Pematang Siantar school environment such as the election of the OSIS chairman, creating discussion forums in class to the implementation of existing extracurricular activities. As a facilitator in the practice of democracy, the teacher is tasked with creating a classroom atmosphere that promotes responsible freedom of expression. He or she fosters self-confidence in students to convey ideas without fear of rejection or ridicule.

Keywords : Democracy, PPKn, Learning Materials

Abstrak

Dalam konteks negara modern, demokrasi menjadi fondasi yang mendasari tatanan hukum, sistem sosial, kebijakan publik, dan budaya politik. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami esensi demokrasi serta peran yang dapat mereka mainkan di dalamnya. Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data diperoleh melalui metode wawancara sehingga instrumen yang digunakan hanya pedoman wawancara. Data yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil riset menunjukkan beberapa tindakan demokrasi di lingkungan sekolah MTsN 2 Pematang Siantar seperti pemilihan ketua OSIS, menciptakan forum diskusi di kelas hingga pelaksanaan ekstrakurikuler yang ada. Sebagai fasilitator dalam praktik demokrasi, guru bertugas menciptakan suasana kelas yang mengedepankan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Ia menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa untuk menyampaikan gagasan tanpa rasa takut akan penolakan atau ejekan.

Kata Kunci : Demokrasi, PPKn, Materi Pembelajaran

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan demokrasi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa harus dikelola dengan bijak agar tidak menjadi sumber konflik. Sistem demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945



dirancang untuk menampung pluralitas tersebut dalam kerangka persatuan. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia harus mampu menjembatani perbedaan dengan semangat gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial (Aswandi & Roisah, 2019)

Demokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ini tidak hanya sebatas bentuk pemerintahan, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai yang dianut dalam hubungan antarwarga negara dan antara rakyat dengan pemerintah. Dalam konteks negara modern, demokrasi menjadi fondasi yang mendasari tatanan hukum, sistem sosial, kebijakan publik, dan budaya politik. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami esensi demokrasi serta peran yang dapat mereka mainkan di dalamnya.

Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara melalui mekanisme pemilu, musyawarah, dan partisipasi politik. Adanya sistem demokrasi mengawal para generasi muda untuk menghadapi beragam tantangan dan memiliki pemahaman yang akurat mengenai hubungan antara Pancasila dan demokrasi (Kemendikbud, 2020). Demokrasi bukanlah konsep yang statis, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Meskipun demokrasi memiliki banyak keunggulan, bukan berarti sistem ini tanpa tantangan. Di era digital, misalnya, penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan polarisasi politik menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi. Selain itu, rendahnya literasi politik dan ketidakpercayaan terhadap institusi publik juga dapat menggerus partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat melalui pendidikan, media yang bertanggung jawab, dan penegakan hukum yang adil.

Menurut Zamroni dalam (Ngarbingan, 2023) sekolah akan mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi di kalangan peserta didik apabila sekolah sudah memiliki kultur yang demokratis. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda diajarkan mengenai nilai-nilai kebebasan, tanggung jawab, toleransi, dan keadilan. Sekolah menjadi tempat latihan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pembelajaran demokrasi tidak hanya dilakukan melalui materi pelajaran, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam kegiatan organisasi, pemilihan ketua kelas, dan pengambilan keputusan secara kolektif.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang baik. Di tingkat SMP, peserta didik berada pada masa transisi dari anak-anak menuju remaja, yang secara psikologis mulai mencari jati diri dan memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial di sekitarnya. Dalam fase ini, penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, termasuk demokrasi, menjadi sangat krusial. Mereka mulai diperkenalkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya musyawarah, dan cara menyelesaikan konflik secara damai.

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang juga mampu menjadi wadah untuk membangun nilai-nilai demokrasi (Rosmawardani, 2023). Materi yang diajarkan mencakup pemahaman tentang



sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, dan partisipasi dalam kehidupan demokratis. Lebih dari itu, guru didorong untuk menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, debat, simulasi pemilu, dan studi kasus yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kerja sama antar siswa.

Guru memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang demokratis. Mereka bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan teladan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi. Guru yang demokratis akan memberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, serta mengarahkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Keteladanan ini jauh lebih efektif dalam menginternalisasi nilai demokrasi dibandingkan dengan sekadar pembelajaran teoretis.

Mukhlis, (2018) mengemukakan bahwa “Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tugas dan peran lebih dari guru mata pelajaran lain” hal ini berkaitan dengan membentuk sikap demokrasi pada peserta didik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Riset ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan berpikir diantaranya penelitian terkait implementasi nilai demokrasi Abdullah O.M (2019), Puspita, M. D. (2021), serta terkait makna dari demokrasi itu sendiri Cahyati, B.S (2024), Sari, D.S (2018). Berdasarkan Latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut penelitian ini dilaksanakan di MTsN 2 Kota Pematang Siantar untuk mengetahui implementasi materi pembelajaran PPKn di sekolah tingkat menengah pertama berbasis madrasah di Kota Pematang Siantar.

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2014), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pada dasarnya, penelitian kualitatif memang bersifat menggambarkan data yang ditemui selama penelitian. Masa penelitian akan menentukan banyak data dalam penelitian karena itulah durasi penelitian penting untuk ditetapkan. Penelitian kualitatif umumnya memerlukan durasi yang lama untuk mencari atau mengumpulkan data di lapangan. Pengamatan peneliti terhadap fenomena di lapangan bisa menjadi temuan data baru yang itu berbeda setiap harinya. Itulah sebabnya mengapa penelitian kualitatif biasanya membutuhkan waktu yang lama.

Dalam riset ini, data diperoleh melalui metode wawancara sehingga instrumen yang digunakan hanya pedoman wawancara. Data yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Riset ini berlokasi di salah satu sekolah menengah pertama berbasis madrasah yang ada di Kota Pematang Siantar yaitu MTsN 2 Pematang Siantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah merupakan miniatur masyarakat, tempat di mana nilai-nilai demokrasi bisa dipraktikkan secara langsung. Pemilihan ketua kelas, organisasi OSIS, forum diskusi kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler adalah contoh nyata penerapan demokrasi. Dalam kegiatan tersebut, siswa belajar tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan pentingnya kerja sama. Dengan mengalami



langsung proses demokratis, siswa tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai warga negara yang aktif.

Data didapatkan melalui lima pertanyaan kompleks yang ditanyakan kepada Ibu Sarimah Piliang, S.Pd. selaku guru PPKn di MTsN 2 Pematang Siantar. Wawancara yang dilakukan menghasilkan beberapa pembahasan terkait tindakan demokrasi di lingkungan sekolah MTsN 2 Pematang Siantar.

Tindakan Demokrasi di Lingkungan MTsN 2 Pematang Siantar

Tindakan demokrasi di sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara secara sehat. Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, bukan hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga arena pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan. Di dalam lingkungan sekolah, nilai-nilai demokrasi dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk kegiatan yang mencerminkan partisipasi, keterbukaan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Hal ini sangat penting untuk mendukung terciptanya budaya demokrasi yang kokoh sejak usia dini.

Hasil wawancara dengan Ibu Sarimah Piliang menjelaskan bahwa setiap aktivitas yang mengedepankan musyawarah, partisipasi siswa, serta keputusan kolektif yang adil, pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang hidup dalam skala kecil. Misalnya, dalam pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, siswa terlibat langsung dalam proses pemilihan umum yang sederhana. Mereka memilih berdasarkan program kerja dan karakter calon yang mereka yakini bisa menjadi pemimpin. Proses kampanye, penyampaian visi-misi, debat antar calon, hingga pencoblosan adalah refleksi nyata bagaimana demokrasi bekerja dalam skala mikro. Melalui aktivitas ini, siswa belajar tentang tanggung jawab sebagai pemilih, pentingnya memilih dengan bijak, dan menghargai hasil pemilihan meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan keinginan pribadi.

Lebih jauh, praktik demokrasi di sekolah juga tercermin dalam forum-forum diskusi siswa yang mendorong keterbukaan berpikir. Dalam situasi ideal, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya dalam suasana yang aman dan menghargai. Forum kelas, musyawarah untuk menentukan kegiatan kelas, penyusunan jadwal piket, hingga penyelesaian konflik antarsiswa menjadi wadah bagi siswa untuk mengalami langsung proses deliberatif yang menjadi ruh demokrasi. Melalui pengalaman ini, siswa tidak hanya mengembangkan keberanian dalam berbicara, tetapi juga belajar mendengarkan, memahami sudut pandang yang berbeda, serta mengembangkan toleransi terhadap perbedaan.

Aktivitas demokrasi yang lebih terstruktur bisa ditemukan dalam pelaksanaan OSIS dan ekstrakurikuler. OSIS sebagai organisasi intra-sekolah menjadi miniatur parlemen siswa yang mewadahi aspirasi dan minat siswa dalam berbagai bidang. Dalam organisasi ini, siswa belajar mengelola program, membagi tugas, menyusun anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban, serta menjalin komunikasi dengan pihak sekolah dan masyarakat. Setiap tahap dalam kegiatan organisasi tersebut memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, yang pada akhirnya membentuk pola pikir dan keterampilan kepemimpinan yang demokratis.



Di samping itu, kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai demokrasi. Misalnya dalam klub debat, siswa tidak hanya diasah kemampuan retorikanya, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dan logis, serta menyusun argumen berdasarkan data dan etika. Kegiatan seperti simulasi sidang, proyek sosial, atau program pengabdian masyarakat yang dikelola oleh siswa secara kolaboratif juga memberikan pengalaman konkret mengenai pentingnya kerja sama, saling menghargai, dan tanggung jawab sosial. Semua ini memperkaya pemahaman siswa tentang demokrasi, tidak hanya sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai nilai hidup yang mereka praktikkan sehari-hari.

Lingkungan sekolah yang demokratis juga ditandai oleh hubungan antara guru dan siswa yang bersifat dialogis. Dalam konteks ini, guru tidak lagi menjadi sosok otoriter yang mendikte, melainkan fasilitator yang membuka ruang bagi partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Guru yang demokratis akan melibatkan siswa dalam menentukan topik diskusi, metode belajar, dan bahkan dalam menyusun rubrik penilaian. Ini memberikan rasa memiliki kepada siswa dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Ketika suara siswa didengar dan dihargai, mereka merasa dihormati dan pada gilirannya akan menghormati orang lain dalam proses yang sama.

Dalam tataran kebijakan sekolah, partisipasi siswa dalam rapat-rapat penting yang menyangkut kegiatan sekolah juga mencerminkan semangat demokrasi. Beberapa sekolah telah mulai melibatkan perwakilan siswa dalam forum seperti komite sekolah, rapat kurikulum, atau penyusunan peraturan sekolah. Partisipasi ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi sarana untuk membangun kesadaran bahwa kebijakan yang baik seharusnya lahir dari aspirasi berbagai pihak, termasuk siswa. Dengan demikian, siswa belajar bahwa hak suara mereka memiliki makna dan bisa membawa perubahan, sekecil apapun itu.

Kesetaraan Berpendapat dalam Tindak Demokrasi di Sekolah

Sebagai bentuk demokrasi, kesetaraan berpendapat di sekolah juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan gagasan. Siswa belajar bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bisa berkata semaunya tanpa memikirkan akibatnya. Mereka dilatih untuk berbicara dengan etika, tidak menyerang pribadi, serta menghargai hak orang lain untuk berbeda pendapat. Proses ini mengembangkan empati dan kemampuan mendengar yang menjadi bekal penting dalam membangun kehidupan sosial yang sehat.

Dalam jangka panjang, lingkungan sekolah yang mendukung kesetaraan berpendapat akan menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang secara sosial. Mereka tumbuh menjadi individu yang menghargai pluralitas, mampu berkontribusi dalam pemecahan masalah bersama, serta siap hidup dalam masyarakat yang kompleks dan dinamis. Demokrasi bukan hanya konsep yang diajarkan dalam buku, melainkan nilai yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, jika kesetaraan berpendapat tidak dijaga, maka sekolah bisa berubah menjadi tempat yang membungkam ide-ide segar dan membentuk generasi yang pasif, tidak percaya diri, serta cenderung mengikuti arus tanpa kemampuan berpikir kritis. Dalam situasi seperti ini, siswa tidak terbiasa mempertanyakan, mengkritisi, atau menawarkan alternatif terhadap suatu kebijakan atau pendapat. Ini tentu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di masyarakat luas.



Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa setiap siswa membawa latar belakang dan pengalaman yang unik, yang jika diberi ruang untuk disuarakan akan memperkaya wawasan kolektif. Dalam diskusi mengenai isu-isu sosial, lingkungan, atau budaya, keragaman perspektif akan memberikan pemahaman yang lebih utuh dan membangun sikap inklusif. Kesetaraan berpendapat mengajarkan bahwa tidak ada satu pun suara yang lebih penting dari yang lain, dan bahwa kebenaran bisa dibangun bersama melalui dialog dan pertukaran ide yang sehat.

Ibu Sarimah Piliang selaku narasumber juga memberikan kesimpulan bahwa kesetaraan berpendapat bukan hanya urusan internal sekolah, melainkan bagian dari upaya bersama membangun peradaban yang berkeadilan. Sekolah, sebagai tempat pertama di mana anak-anak belajar hidup bersama orang lain yang berbeda, memainkan peran vital dalam membentuk pola pikir demokratis yang akan dibawa siswa ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk itu, tidak boleh ada kompromi dalam memperjuangkan ruang-ruang dialog yang bebas dan setara di sekolah. Kita semua bertanggung jawab menjaga agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara, didengarkan, dan dihargai. Hanya dengan demikianlah demokrasi bisa tumbuh kuat, tidak hanya sebagai sistem politik, tetapi sebagai budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Tindak Demokrasi di Sekolah

Sebagai fasilitator dalam praktik demokrasi, guru bertugas menciptakan suasana kelas yang mengedepankan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Ia menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa untuk menyampaikan gagasan tanpa rasa takut akan penolakan atau ejekan. Ruang kelas pun menjadi ruang yang aman, di mana setiap ide dihargai sebagai kontribusi berharga, bukan sesuatu yang harus dihakimi. Dalam suasana semacam ini, siswa belajar bahwa setiap orang memiliki hak yang setara untuk berbicara, didengarkan, dan dipertimbangkan pendapatnya.

Fasilitasi yang dilakukan guru mencakup kemampuan menyusun strategi pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai subjek aktif. Model pembelajaran kooperatif, diskusi kelompok, debat, simulasi musyawarah, hingga pembelajaran berbasis proyek menjadi sarana ideal dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Melalui strategi ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga belajar mengambil peran dalam kelompok, menyampaikan pendapat dengan santun, mendengarkan orang lain, serta menyelesaikan konflik dengan cara damai dan argumentatif.

Guru sebagai fasilitator juga harus peka terhadap dinamika kelas dan mampu mengelola perbedaan pendapat secara bijaksana. Ketika terjadi konflik gagasan, guru hadir bukan untuk memaksakan pendapatnya, melainkan sebagai mediator yang membantu siswa menemukan titik temu. Dengan cara ini, siswa belajar bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi jembatan untuk memperkaya pandangan. Guru pun berperan sebagai teladan dalam menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, dan mendorong dialog yang produktif.

Selain dalam interaksi pembelajaran, peran fasilitator demokrasi juga tercermin dalam partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sekolah. Guru mendampingi siswa dalam menyusun aturan kelas bersama, menentukan metode evaluasi yang adil, serta memberikan kesempatan untuk menilai kegiatan belajar yang telah berlangsung. Pendekatan



ini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap keputusan kolektif serta membentuk budaya sekolah yang lebih demokratis dan humanis.

Pada akhirnya, Ibu Sarimah Piliang menegaskan bahwa guru sebagai fasilitator demokrasi di sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk generasi yang berpikiran terbuka, kritis, toleran, dan siap hidup dalam masyarakat plural. Pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan sikap demokratis akan menghasilkan individu yang pintar secara akademis, tetapi rapuh dalam menghadapi keberagaman dan perbedaan. Sebaliknya, dengan guru yang mampu membimbing siswa dalam kehidupan demokratis sehari-hari, sekolah akan menjadi tempat pembibitan warga negara yang matang secara intelektual dan moral.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang baik. Di tingkat SMP, peserta didik berada pada masa transisi dari anak-anak menuju remaja, yang secara psikologis mulai mencari jati diri dan memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial di sekitarnya. Dalam fase ini, penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, termasuk demokrasi, menjadi sangat krusial. Mereka mulai diperkenalkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya musyawarah, dan cara menyelesaikan konflik secara damai.

Tindakan demokrasi di sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara secara sehat. Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, bukan hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga arena pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan. Di dalam lingkungan sekolah, nilai-nilai demokrasi dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk kegiatan yang mencerminkan partisipasi, keterbukaan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

Guru sebagai fasilitator demokrasi di sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk generasi yang berpikiran terbuka, kritis, toleran, dan siap hidup dalam masyarakat plural. Pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan sikap demokratis akan menghasilkan individu yang pintar secara akademis, tetapi rapuh dalam menghadapi keberagaman dan perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. M., & Umawaitina, N. (2019). Upaya Guru PPKN dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila pada Peserta Didik kelas VII-11 di SMP Negeri 2 Kota Ternate. *Jurnal GeoCivic*, 2(1).
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Cahyati, B. S., Zahra, F. A., Naima, N., & Hasanah, N. (2024). Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 687-693.
- Ien Ngarbingan, S. (2023). PEMBINAAN KARAKTER DEMOKRATIS SISWA MELALUI RUANG KELAS SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRATIS PPKN DI SMP NEGERI



3 KABUPATEN SORONG (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).

Kemendikbud. (2020). Pendidikan Karakter Wujudkan Pelajar Pancasila

Mukhlis, A. H. (2018). Peranan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Sikap Warganegara yang Demokratis dan bertanggung Jawab. STKIP Pasundan Cimahi. Cimahi.

Puspita, M. D. (2021). Strategi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Di Smp N 5 Batang (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Semarang).

Rosmawardani, A. J. A., & Patmisari, P. (2023). Analisis Peran Guru dalam Membangun Nilai-Nilai Demokrasi Siswa melalui Pembelajaran PPKn di MAN 2 Ponorogo. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(8), 5532-5541.

Sari, D. R., Nurmalisa, Y., & Rohman, R. (2018). Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila Pengurus Osis Menurut Permendiknas No. 39 Tahun 2008. JURNAL KULTUR DEMOKRASI (JKD), 5(13).

Sugiyono. (2014) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.